

FUNGSI KOPERASI UNTUK MENINGKATKAN MODAL PADA UMKM GUNA MENANGGULANGI KEMISKINAN

Fiky Presilia Putri

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jl. Majapahit 666b Sidoarjo

Email : fikypresilia@gmail.com

Abstrak

Di Negara Indonesia saat ini perlu kita ketahui bahwa sangat banyak sekali masyarakat yang mendirikan usaha sendiri di sektor Usaha Mikro Kecil maupun Menengah (UMKM) . Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini sendiri mempunyai banyak kedudukan yang penting membangun sektor perekonomian di Indonesia. Namun, UMKM ini sendiri juga mempunyai banyak kendala dalam perjalanannya. Mereka masih merasa kesusahan untuk menjangkau pembiayaan usaha yang telah diberikan oleh lembaga keuangan maupun perbankan syariah untuk menjalankan usahanya. Upaya untuk mengoperasikan koperasi dan UMKM melalui LKS pada dasarnya membutuhkan tahapan-tahapan yang cepat, tepat, dan strategis yang biasanya berupa peningkatan visi maupun misi bisnis yang sesuai syariat Islam, sehingga tercipta SDM berkualitas islami pula. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui manfaat, peluang, biaya dan risiko lembaga keuangan syariah khususnya

koperasi dalam mengembangkan usaha mikro juga mengatasi masalah kemiskinan dalam masyarakat.

Kata kunci : UMKM, LKS, Usaha, Koperasi, SDM, kemiskinan



BAB I

A. PENDAHULUAN

Kondisi perekonomian di Negara Indonesia pada tahun 2018 ini terlihat meningkat. Hal ini ditunjukkan pada perkembangannya yang lebih signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2017. Hal ini dapat dilihat dari usaha perbaikan di sektor perekonomian global di tahun ini yang dinilai dapat menjadi faktor untuk mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia ini sebesar 5,4%. Pemerintah sendiri telah menargetkan ini dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018. Angka tersebut sebenarnya masih dibawah target awal yakni 7% yang sudah dipatenkan oleh presiden RI Joko Widodo.

Pemerintah juga terus berusaha keras dalam hal merenovasi, mereformasi, juga memangkas subsidi bahan bakar sehingga dapat menciptakan ruang fiskal yang lebih luas untuk mengalihkan pembiayaan pembangunan jalan raya, jalur kereta api, maupun pelabuhan. Pemerintah telah berada pada jalur yang benar saat ini untuk kemudian ditugaskan untuk lanjut menyelesaikan sebagian besar proyek-proyek yang sedang dalam masa pembangunan di tahun ini.

Di dalam sebuah penataan kehidupan di sektor ekonomi, koperasi, usaha kecil dan menengah memiliki kedudukan yang penting pula dalam berusaha untuk mengentaskan penyakit kemiskinan. Koperasi dan UMKM akan memberikan

beberapa kesempatan untuk bisa berusaha juga untuk bekerja sebagai perwujudan dari sebuah program pemberdayaan ekonomi yang ditujukan untuk masyarakat. Keberadaan usaha kecil menengah dengan segala definisinya diharuskan untuk mencakup peluang-peluang dalam sektor ekonomi yang amat sulit dengan dibantu oleh manajemen yang berkualitas untuk menghasilkan suatu barang maupun jasa.

Melihat kondisi sektor Indonesia yang baik ini membuat pemerintah dapat sedikit berlega hati. Dengan begini dapat membuka peluang bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam menjalankan roda bisnisnya. Perkembangan untuk potensi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia ini tidak terlepas dari peran perbankan dalam menyalurkan pendanaan pada sektor UMKM. Jumlah pelaku usaha industry UMKM di Indonesia termasuk paling banyak daripada negara yang lain, teruntuk tahun 2014 yang terus mengalami perkembangan.

Melihat dari data kementerian Koperasi dan UMKM, kontribusi dari UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) telah melampaui 61% daripada usaha mikro 30,3%, usaha kecil 12,8 persen, dan usaha menengah 14,5. Ada pula kontribusi anatar Koperasi terhadap PDB telah mencapai angka 23,12%. Tidak diragukan lagi, selain soal keefisiensian,efektivitas waktu, juga kemampuan untuk berusaha, sektor UMKM ini juga memiliki kendala pada bagian permodalan. Maka dari itu, UMKM ini sendiri sangat membutuhkan modal juga adanya pelatihan mengelola modal agar mereka bias bangun dan bangkit lagi.

B. KONDISI UMUM KOPERASI

Koperasi merupakan bagian pelaku dari sektor ekonomi yang sudah didambakan untuk dijadikan tokoh utama perekonomian nasional sampai hari ini yang masih jauh dari yang telah ada di harapan. Faktor seperti ini merupakan sebab dari adanya undang-undang yang dipakai tidak mempunyai tempat untuk membangun suatu koperasi yang dapat dikatakan mandiri dan sehat. faktor yang lain berasal dari kebijakan untuk kepelatihan perkoperasian ini yang masih mengandalkan uluran tangan dari pemerintah yang berakibat menumbuhkan rasa bergantung yang akhirnya menghambat daya kreatifitas yang tinggi menjadi angan-angan saja sehingga membuat diri sendiri menjadi tidak percaya diri akan kemampuan yang dimiliki.

Tidak hanya itu saja, ada pula beberapa faktor lain yang menjadi kelemahan untuk koperasi sehingga menghambat laju dari berkembangnya koperasi tersebut yang antara lain : Pertama, citra dari perkoperasian. Sampai saat ini menurut masyarakat umum menilai bahwa koperasi sendiri belum berkembang dengan baik. Adapun bukti-bukti empirisnya yang masih memperlihatkan pertumbuhan koperasi yang secara umumnya masih juga belum bisa memenuhi apa yang sudah menjadi harapan-harapan orang diluar sana apalagi mewujudkan koperasi secara nyata. Sampai saat ini koperasi ini sendiri masih dipandang sebelah mata dengan

rangkaian badan usaha yang mempunyai kualitas kerja yang kurang baik atau biasa disebut lemah dan masih dianggap sebagai salah satu tempat untung golongan-golongan ekonomi yang lemah juga tidak ada potensi untuk dapat diajak bekerjasama oleh badan usaha yang lain.

Yang kedua, kemandirian dari koperasi. Alur untuk pembinaan yang sudah dijalankan sampai saat ini sudah menumbuhkan rasa ketergantungan oleh koperasi sendiri pada semua program-program yang diberikan oleh pemerintah. Di dalam memilih para pengurus koperasi biasanya sering terjadi ikut campur pemerintah yang menjadikan koperasi itu sendiri tidak memiliki ruang otonomi dan bentuk kemandirian untuk mengeluarkan keputusan terutama dalam rapat anggota yang dimana sebagai kekuasaan paling tinggi dalam struktur koperasi. Kenyataan ini jelas memperlihatkan bahwa dalam menjalankan nilai dan prinsip-prinsip dasar yang hakiki dari koperasi itu sendiri masih belum dapat diwujudkan.

Ketiga, faktor sumber daya manusia. Terbatasnya ilmu pengetahuan juga cara pemahaman para anggota yang mengelola koperasi tentang teknik dari perekonomian yang paling utama adalah hakikat dan ciri-ciri dari koperasi yaitu sebagai badan usaha. Di sisi lain, anggota yang diserah tugaskan untuk dapat mengatur system koperasi itu sendiri masih belum mempunyai banyak pengetahuan akan koperasi, juga keproduktifan dalam kewirausahaan yang dapat menampung banyak hal yang akibatnya akan berdampak pertumbuhan juga kualitas kerja dari koperasi itu sendiri menjadi kurang baik dalam menjalankan prinsip-prinsip dalam koperasi, juga masih rendahnya uluran tangan dari para anggota

koperasi untuk ikut berpartisipasi di dalamnya. Kualitas sumber daya manusia (SDM) koperasi yang sangat sedikit menimbulkan dampak yang kurang baik pada manajemen koperasi yang tidak professional sehingga koperasi itu sendiri tidak bisa memperlihatkan laju pertumbuhan dan kualitas kerja yang professional pula.

Keempat, permodalan. Keahlian dalam mengelola permodalan dalam koperasi ini relative masih sangat minim yang telah diakibatkan karena kurangnya keikutsertaan para anggota koperasi dalam mengelola modal dari koperasi yang begitu sedikit. Inilah yang juga menjadi penyebab yaitu masih minimnya rasa kesadaran para anggota koperasi juga kemampuan dalam sector ekonomi yang masih rendah pula. Di sisi lainnya, jalan koperasi sendiri untuk sampai kepada para sumber-sumber permodalan maupun pembiayaan juga dalam lingkup yang sangat minim akibat dari tidak berkembangnya usaha-usaha koperasi yang mempunyai ekonomi sekaligus rendahnya kredibilitas koperasi di mata para kreditur.

Kelima, cakupan dan skala usaha. Cakupan dan skala usaha dalam koperasi ini pada umumnya juga dalam kondisi yang sangat minim dan cenderung terikat pada program-program yang diberikan oleh pemerintah dan lebih dominan bergerak di sector pertanian misalnya seperti produksi juga bahan pangan. Ada pula kegiatan yang bersifat non program yang dapat dilakukan dalam kegiatan menjual dan mengecerkkan barang-barang tersebut kedalam warung serba ada milik para warga sekitar dan usaha simpan pinjam yang juga masih relative sedikit progresnya.

Ketujuh, kerjasama dalam usaha. Bentuk kerjasama usaha antar koperasi satu dengan yang lain ini bias dilakukan baik secara vertical dan horizontal yang nantinya akan dibantu dengan badan usaha-usaha yang lainnya agar bisa saling mengisi kekurangan satu dengan lainnya. Pada dasarnya peran dari koperasi sekunder yang diinginkan adalah dapat membantu terlaksananya kegiatan usaha-usaha koperasi primer yang masih belum optimal.

Di dalam sejarah perkembangannya, koperasi di Indonesia ini telah dicetuskan dan faktor dalam mendirikannya ini dilandasi oleh para aparatur pemerintah yang sesudahnya di kembangkan agar sejalur dengan berdirinya keikutsertaan masyarakat. Untuk pengendalian maupun pembinaanya asal mulanya telah dijalankan oleh pemerintah sendiri secara berkelanjutan. Pertumbuhan laju koperasi di Indonesia ini sudah melewati macam-macam periode, antara lain dimulai dari zaman penjajahan, masa awal kemerdekaan, masa orde lama, masa orde baru, dan era reformasi. Pola yang lebih cenderung memprioritaskan pertumbuhan yang kuantitas. Di masa yang lalu sudah menjadi pendorong berdirinya koperasi yang dicetuskan oleh pemerintah (top down approach) ketimbang yang berdiri dikarenakan keinginan sendiri (botton up approach). Kajadian seperti ini menjadikan koperasi menjadi tidak mempunyai sifat fundamental yang kuat (solid) didalam perkembangannya diakibatkan tingginya campur tangan pemerintah dalam melaksanakan bimbingan pada koperasi sehingga terlalu banyak koperasi yang sudah memiliki badan hokum namun tidak aktif dalam menjalankan berbagai kegiatan. Dari ulasan diatas dapat kita lihat bahwa koperasi masih dalam keadaan yang

lemah. Maka dari itu perlu adanya perencanaan konsep-konsep yang sudah tertata secara strategis agar dapat memecahkan berbagai masalah yang telah terjadi juga yang akan datang nantinya dan koperasipun dapat ikut berperan serta sebagai pelaku agen untuk memperbarui dan menggerakkan sector perekonomian khususnya ekonomi nasional.

C. FUNGSI DAN PERAN UMKM DALAM SEKTOR PEREKONOMIAN DI INDONESIA

Fungsi maupun peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di negara Indonesia lumayan banyak dari segi ekonomi, sosial, politik, budaya, dan keamanan. Fungsi dan perannya dalam segi tersebut dapat meningkatkan pendapatan para masyarakat, dapat menanggulangi pengangguran juga kemiskinan serta pola urbanisasi yang ada saat ini. Meskipun fungsi dan peranan UMKM ini begitu penting akan tetapi, sampai saat ini masih belum ada deskripsi juga teori yang pantas untuk UMKM di Indonesia ini. Untuk saat itu teori dari baratpun tidak dapat ditolak sia-sia untuk bisa menyelesaikan persoalan yang sedang dilalu oleh para pelaku UMKM di Indonesia. Akan tetapi ada ciri yang lebih spesifik, yakni UMKM merupakan salah satu organisasi ekonomi maupun bisnis yang mempunyai susunan yang sangat sederhana, cukup aktivitas yang diformalkan, teknologi yang dipakai pun masih sederhana, penganturan manajemennya pun efektif, jadi sedikit sulit untuk menentukan kekuasaan pribadi dengan asset usaha yang dijalaninya,

cara melakukan administrasinya juga sangat mudah bahkan lebih sering terlihat tidak memiliki administrasi serta tidak adanya elaborasi.

Di dalam rancangan perekonomian di Indonesia, UMKM adalah salah satu aktivitas ekonomi masyarakat yang lebih produktif dimana letaknya sangat mendominasi lebih dari 99% diantara yang lainnya di dalam sector perekonomian nasional. Ketika diteliti secara mendetail letak UMKM cukup dilematis. Di samping itu tempatnya dianggap sebagai dewa penolong oleh masyarakat dikarenakan telah berhasil bertahan dikala waktu kritis ekonomi merajalela dan dapat menjadi titik tumpu atas semua angan-angan rakyat. Oleh karena itu keberadaannya sanggup memberikan kesempatan untuk para pengangguran, dapat mengurangi angka kemiskinan, dan mampu menghadapi derasnya arus urbanisasi, serta memiliki fungsi sebagai motor penggerak akan perkembangan nasional maupun di daerah-daerah.

Di samping itu keadaan UMKM saat ini juga sedang mengalami kendala juga keterbatasan baik secara internal maupun eksternal. Sejak sebelum krisis ekonomi tahun 1997 hingga saat ini tahun 2008 struktur keberadaan UMKM di Indonesia tetap sangat dominan. Berdasarkan data BPS, pada tahun 1996 ada sebanyak 38,9 juta unit usaha pelaku UMKM di Indonesia, yang sebagian besar berasal dari sektor pertanian. Selanjutnya, pada tahun 1998 di Indonesia masih terdapat 36,8 juta unit pelaku usaha di mana 99% lebih adalah pelaku UMKM. Pada saat itu keberadaan UMKM telah menyerap 64,3 juta orang dan kontribusinya terhadap PDB sebesar 58,2%. Dari total UMKM yang ada, 80% belum pernah atau tidak mendapatkan

fasilitas kredit perbankan. Padahal, keberadaannya 96% lebih tahan terhadap krisis ekonomi, diantaranya sebanyak 65% tidak terpengaruh krisis, serta sebesar 31% mengurangi usaha, dan hanya 4% saja yang usahanya berhenti.

D. KARAKTERISTIK DAN PERAN UMKM UNTUK MENANGGULANGI KEMISKINAN

UMKM berpotensi sangat besar dalam perannya untuk menyerap tenaga kerja, dimana masih perlu terus menerus ditingkatkan dan dimaksimalkan. Oleh karena itu, UMKM harus didukung dengan penerapan aturan yang lebih kondusif, dengan tidak memberatkan para pelaku UMKM. Sementara, sampai saat ini para pelaku UMKM masih banyak yang harus menanggung banyaknya pungutan dan pengurusan perijinan yang lama juga menghabiskan biaya yang mahal. Peraturan yang kurang mendukung untuk UMKM ini yang menjadikan hal tersebut terasa kontraproduktif terhadap keberlangsungan UMKM. (Oktavia,2017)

Untuk melakukan pemberdayaan dan pembangunan yang komprehensif maka kita perlu memahami karakteristik dan problema UMKM, sehingga dengan mengetahui kondisinya maka dapat dilakukan diagnosa lebih baik untuk menentukan solusi terbaik. Adapun karakteristik UMKM adalah sebagai berikut:

- (1) Mempunyai skala usaha yang kecil baik modal, penggunaan tenaga kerja maupun orientasi pasar.
- (2) Banyak berlokasi di pedesaan, kota-kota kecil atau daerah pinggiran kota besar.
- (3) Status usaha milik pribadi atau keluarga.
- (4)

Sumber tenaga kerja berasal dari lingkungan sosial budaya (etnis, geografis) yang direkrut melalui pola pemagangan atau melalui pihak ketiga. (5) Pola kerja seringkali part time atau sebagai usaha sampingan dari kegiatan lainnya. (6) Memiliki kemampuan terbatas dalam mengadopsi teknologi, pengelolaan usaha dan administrasinya sederhana. (7) Struktur permodalan sangat terbatas dan kekurangan modal kerja serta sangat tergantung terhadap sumber modal sendiri dan lingkungan pribadi. (8) Izin usaha seringkali tidak dimiliki dan persyaratan usaha tidak dipenuhi. (9) Strategi perusahaan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang sering berubah secara cepat.

Secara teori ekonomi pembangunan, laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang didukung oleh pertumbuhan sektor industri akan mendorong meningkatnya permintaan terhadap tenaga kerja yang pada gilirannya akan memperluas kesempatan kerja. Meningkatnya kesempatan kerja baru akan mendorong tingkat pendapatan masyarakat, sehingga daya beli masyarakat akan meningkat. Selanjutnya, perluasan kesempatan kerja berarti berkurangnya pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Menurut Amarta Sen (Peraih Nobel Ekonomi Kesejahteraan, 1998), seseorang disebut miskin karena tak punya akses untuk memenuhi kebutuhannya. Akses yang menjadi hak setiap orang ditentukan oleh “nilai diri”. Bagi sebagian orang, nilai diri yang dimiliki sebatas tenaga kerja. Oleh karena itu, kemiskinan dan kelaparan tidak dapat diatasi dengan hanya sekedar memperbesar produksi (laju pertumbuhan

ekonomi) saja. Dengan demikian, jika pemberantasan kemiskinan adalah motif utama setiap kebijakan pembangunan, maka upaya penyediaan lapangan kerja serta peningkatan penghasilan orang miskin adalah tujuan terpenting semua kegiatan, dan peran usaha kecil termasuk industri kecil kerajinan (UMKM) dapat diyakini sebagai pendukung utama perekonomian rakyat dalam motif ini. (Prasetyo, 1998, 2007). Oleh karena itu, masalah memanusiaikan manusia, pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi, dan nasionalisme pengamanan masa depan orang miskin harus menjadi fokus utama setiap kebijakan pembangunan di Indonesia pada saat ini dan ke depan.

Selanjutnya, kesempatan yang sama harus dapat diberikan melalui kebijakan dan regulasi serta iklim usaha yang sehat dalam persaingan antar UMKM dan usaha besar di Indonesia, karena pemberantasan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja dirasakan akan lebih berhasil daripada penyediaan output. Dengan kata lain, fungsi dan peran UMKM dapat diakui telah terbukti tahan banting dan lebih kebal terhadap krisis, serta mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar. Dengan demikian, peran UMKM dapat dijadikan sebagai ujung tombak penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

KESIMPULAN

Upaya pengembangan koperasi dan UMKM memerlukan langkah-langkah taktis dan strategis berupa peningkatan visi dan misi bisnis yang sesuai syariah Islam, sehingga tercipta SDM yang islami dan berkualitas. Masalah paling utama dan pertama yang sering menjadi kendala keberadaan UMKM adalah rendahnya pangsa pasar. Modal tetap masih masalah utama tetapi, bukanlah selalu menjadi masalah yang pertama, karena pada umumnya masalah kekurangan modal pada UMKM lebih mudah diatasi dengan sendirinya selama hasil produksi laku keras di pasaran dan sebagian dari keuntungan yang diperoleh tersebut dapat dimasukkan kembali sebagai modal yang berputar. Sebaliknya, sekalipun modal usaha besar dan dapat meningkatkan kapasitas produksi tetapi, jika pangsa pasarnya terbatas, maka akan lebih dekat dengan kerugian dan kebangkrutan. Dan satu hal yang paling penting adalah sebagian besar UMKM tidak pernah mengikuti pameran produk atau pameran produk ekspor.

Melihat kenyataan itu, maka kebijakan pemerintah dalam memberdayakan UMKM melalui bantuan modal usaha tidaklah salah dan tetap harus diteruskan dan ditingkatkan, sebab UMKM identik dengan “(Usaha Memang Kurang Modal)”. Tetapi, sadarlah bahwa keberadaan UMKM itu beragam dan tidak selamanya masalah utama dan pertama yang dibutuhkan oleh UMKM adalah masalah permodalan. Bisa jadi masalah utama dan pertama yang sedang dihadapi oleh UMKM adalah masalah terbatasnya faktor pemasaran termasuk masih terbatasnya

pangsa pasar dan rendahnya daya saing, maka masalah inilah yang harus segera diselesaikan terlebih dahulu. Oleh karena itu, sebaiknya program kebijakan yang baik untuk diterapkan dalam pemberdayaan UMKM adalah bersifat simultan.



DAFTAR PUSTAKA

Brata, Gunadi Aloysius, 2003. *Distribusi Spasial UKM di Masa Krisis Ekonomi. Jurnal Ekonomi Rakyat, No. 8, Tahun II, November.*

Krisnamurti, Bayu, 2003. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah: Ekonomi Rakyat dengan Cara Berekonomi Sendiri. Pusat Studi Pembangunan, IPB, Bogor.*

Kompas, 2008. *Fokus Ekonomi Rakyat; Masalah Besar di Usaha Kecil. Kompas Jumat, 29 Februari, 2008.*

Chapra Umer. 2000. *Islam dan Pembangunan Ekonomi. Gema Insani Press, Jakarta.*

Partomo, Titik S., dan Abd. Rachman S., 2004. *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi. Ghalia Indonesia, Jakarta.*

Prasetyo, P., Eko, 2002. *Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Ekonomi Rakyat. Topik Khusus, Program Pascasarjana, Unpad, Bandung.*

Prasetyo, P. Eko, 2007, "Peran IPTEK dalam Penanggulangan Kemiskinan", Makalah Seminar Nasional, Kabupaten Kendal, 13 November, 2007.

Tasmara Toto. 2002. *Membudayakan Etos Kerja Islami. Gema Insani, Jakarta.*

Afzalurrahman. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam. Jakarta: Logos.*

Sumodiningrat, Gunawan, 1998. Membangun Perekonomian Rakyat. Pustaka Pelajar dan IDEA, Yogyakarta.

